

Wanita dalam Revolusi

Pengalaman Selama Pendudukan dan Revolusi, 1942-1950*

Selama ini historiografi tentang zaman Pendudukan dan Revolusi Indonesia berangkat dari dan dipenuhi oleh berbagai sumber yang selalu mengedepankan peran penting yang dilakukan pria. Pertanyaan dimana atau siapa aktivis wanita saat itu seringkali dijawab dengan keharusan wanita untuk bekerja dan berperan di tempat yang memang bidangnya. Bila dikaji secara lebih kritis, wanita tidaklah sekedar menjalankan peran-peran "tradisional" itu. Anton E. Lucas, dengan melakukan metode wawancara, mencoba memperluas pemabaman masa-masa kritis itu dengan memasukkan pula pengalaman dan pengertian wanita yang terkait dengan perjuangan revolusioner.

Anton E. Lucas

Pengajar pada Flinders University Adelaide,

Australia



Anton E. Lucas, lahir di Melbourne, Australia, 1946. Melakukan penelitian sambil mengajar di Indonesia (1970-1976). Memperoleh MA (1972) dari University of Hawaii dan Ph.D (1981) dari Australian National University. Pernah diperbantukan pada Pusat Latihan dan Penelitian Ilmu-ilmu

Sosial (PLPIS) Universitas Hasanuddin (1985-1986).

Penyunting monograf *Local Opposition and Underground Resistance to the Japanese in Java* (1986) dan *One Soul One Struggle: Regional and Revolution in Indonesia* (1991).

Saat ini sedang mengadakan penelitian tentang tanah dan lingkungan hidup di Indonesia.

Pada sebuah seri seminar tahunan (1979) yang diselenggarakan bersama Perhimpunan Australia-Indonesia (*Australian-Indonesian Association*) cabang Victoria dengan Pusat Studi Asia Tenggara (*Centre for Southeast Asian Studies*) Universitas Monash, sejarawati Christian Dobbin menguraikan tiga karya historis sangat terkenal tentang sejarah sosial-politik Indonesia abad ke-20.¹ Ketiga karya tersebut, menurut Dobbin, mengabaikan wanita" sebagai

* Dialihbahasakan dan diberi anotasi oleh Arief W. Djati serta diperiksa ulang penulisnya.

1. Ketiga karya tersebut adalah Robert Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite* (The Hague, 1970); John Ingleson, *Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement, 1927-1934* (Singapore, 1979); dan Benedict R. O'G Anderson, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972).

** Konon pengertian wanita berasal dari Bahasa Jawa, *wanita*. Kata ini diartikan sebagai "wani ditoto" (berani diatur). Implisit di sini diartikan bahwa kaum bervagina bisa dan harus diatur oleh kaum berpenis (karena hanya terdapat dikotomi jenis kelamin). Belum jelas sejak kapan kata ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Mungkin saja sudah ada semenjak jaman

bagian dari proses historis — masa awal pergerakan nasional, tahun 1930-an, dan Revolusi Indonesia — yang dibahas penulisnya.²

Kritik Dobbin terhadap eksklusivitas pria mendefinisikan paradigma pemuda dalam studi tentang revolusi,³ tentu segera menggugah keabsahan saya. Saya sendiri telah menulis sejarah sosial dalam periode tersebut dengan menggunakan sumber lisan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa dan proses lokal tahun 1930-an, pendudukan Jepang, dan awal revolusi di Karesidenan Pekalongan. Dimana suara wanita di antara informan saya saat itu? Hampir semuanya adalah kaum pria. Saya terus-menerus meng-

prakolonial. Dapat dicatat bahwa kata ini sempat digunakan pertama kali oleh organisasi putri Boedi Oetomo, *Wanita Oetomo* pada awal abad ke-20. Kata ini jelas dianggap merendahkan posisi kaum bervagina di hadapan kaum berpenis dan karena itu banyak kaum feminis lebih memilih kata *perempuan* untuk menyebut kaum bervagina. Pilihan kata ini didasarkan anggapan akar kata perempuan adalah "*empu*," yang berarti kemandirian. Pertumbuhan dan perkembangan kata ini juga sulit dilacak. Walaupun kaum feminis sudah mendaulat kata perempuan untuk menyebut kaum bervagina, tetapi dalam realitas keseharian, kata wanita masih sangat populer. Saya mengalihbahasakan *woman* menjadi wanita dengan pertimbangan menghindari anakronisme. Sebab, pada masa revolusi banyak organisasi untuk kaum bervagina menggunakan kata wanita sehingga dapat disimpulkan bahwa kata wanita merupakan sebutan umum untuk kaum bervagina.

2. Christine Dobbin, "The Search for Women in Indonesian History," dalam, *Kartini Centenary: Indonesian Women Then and Now* (Monash University, 1990), hal. 66. Saat mengakhiri makalahnya, Dobbin mengakui bahwa karyanya sendiri memang terpengaruh bias serupa dan menyerukan kepada kita "...untuk lain kali berbuat lebih baik."

*** Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang buta gender sehingga mempunyai banyak kosakata yang bermakna majemuk, salah satunya adalah kata pemuda. Dalam struktur bahasa Indonesia, pemuda selalu berarti ganda, sebagai pria-wanita, tidak hanya merujuk kepada mereka yang berpenis. Menurut Ben Anderson, sebagaimana wawancara dengan Sigit Sudjalno via Internet, 22 Juni 1995, kata pemuda belum lazim digunakan pada masa revolusi. Namun seiring dengan perubahan jaman, yang menurut saya ada kaitannya dengan pembangunian, bahasa itu mulai berkenalan dengan gender sehingga ia dituntut lebih spesifik menyebutkan subyek. Atas dasar itu, mungkin akan muncul sejumlah kata ganjil dalam tulisan ini seperti pemuda wanita/pria (*female/male youth*).

ajukan pertanyaan "di mana atau siapa aktivis pemuda (wanita)" kepada mereka, namun jawaban yang muncul selalu nyaris serupa, "wanita bekerja di dapur umum."⁵ Hal ini diartikan oleh informan pria, mendukung perjuangan fisik dengan menyiapkan makanan bagi mereka yang tengah beraksi melucuti tentara dan pegawai Jepang yang tersisa dan kemudian menghadapi elite birokrasi Jawa didikan Belanda yang sejak awal tampak enggan menyambut gerakan Republik Indonesia.⁴

Tulisan ini berusaha melewati penulisan sejarah revolusi yang ada, sebagian besar berdasarkan wawancara dengan atau laporan-laporan kontemporer yang ditulis kaum pria, yang mencatat berbagai aktivitas, baik karena alasan kultural maupun *gender*, pria sebagai pelaku utama.

Dalam nada persoalan yang diajukan Susan Blackburn tentang apakah demokrasi di Indonesia mempengaruhi separuh penduduk berjenis kelamin wanita,⁵ kita sebaiknya bertanya tentang peranan "separuh yang lain" penduduk Indonesia itu selama revolusi. Apakah pengalaman masa pendudukan dan revolusi membuat kehidupan wanita Indonesia berbeda? Untuk menjawabnya, kita harus melihat secara singkat zaman Pendudukan Jepang, masa penuh dengan kesulitan ekonomi yang lebih banyak dipikul wanita daripada pria.

3. Anton Lucas, "The Bamboo Spear Pierces the Payung: the Revolution against the Bureaucratic elite in North Central Java in 1945," Australian National University Ph.D., 1981, hal. 258.

4. *Ibid.*, hal. 103-104, 454. Di samping itu ada beberapa wanita yang menjadi aktivis sayap kiri bawah tanah selama Pendudukan di Karesidenan Pekalongan. Untuk biografi seorang aktivis wanita bawah tanah; lihat pula tulisan Sintha Melati (nama samaran), yang menggambarkan pengalamannya dalam berbagai kelompok bawah tanah anti-Fasis, berjudul, "In the Service of the Underground: The Struggle Against the Japanese in Java," (alihbahasa dan anotasi oleh David Bourchier) dalam Anton Lucas (ed.), *Local Opposition and Underground Resistance to the Japanese in Java*, Centre of Southeast Asia Studies (CSEAS), Monash University, 1986, hal. 123-261.

5. Susan Blackburn, "Gender Interest and Indonesian Democracy," Makalah dipresentasikan dalam konferensi tentang demokrasi di Indonesia, Monash University, Desember 1992

Sejumlah wanita tentu adalah aktivis muda (atau pemuda) pada zaman Revolusi dan bergabung dengan organisasi yang dibentuk oleh wanita yang membantu perjuangan politik menentang kembalinya Belanda. Organisasi-organisasi itu sebagian besar berada dan berpijak di kota. Apa yang dilakukan mereka adalah merekrut wanita-wanita berpendidikan Belanda yang tinggal di kota-kota besar (khususnya Surakarta dan Yogyakarta). Kebanyakan wanita tidak memiliki peluang bergabung dalam organisasi semacam itu meskipun mereka menginginkan atau bebas melakukannya. Tanggung jawab mengurus keluarga dan menghidupi rumah tangga, yakni peran-peran *gender*, barangkali menjadi alasan untuk tidak memasuki organisasi-organisasi tersebut.⁶

Tulisan ini lalu mencoba meninjau lebih kritis tentang "absennya aktivis wanita," bukan menanyakan mengapa mereka "absen," dari tahap revolusioner dan peran serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan wanita Indonesia selama periode 1945—1949. Saya hendak memperluas pemahaman apakah pengalaman revolusioner memasukkan pula pengalaman-pengalaman wanita serta memperhatikan wanita dalam revolusi Indonesia atas pengertian-pengertian mereka sendiri. Bagaimana wanita menghayati atau mengaitkannya dengan perjuangan revolusioner? Apakah mereka menganggap sebagai bagian atau di luar perjuangan itu? Jenis peran apa yang diharapkan wanita sepanjang lima tahun perjuangan revolusioner? Apakah peran itu melintasi batasan *gender*? Apakah kekacauan sosial dan politik 1945—1950 memberi kesempatan kepada wanita untuk bertindak

"menyimpang" daripada masa sebelumnya?

Kajian ini didasarkan penelitian lapangan yang pernah dilakukan di Indonesia dalam bulan Juli 1993. Sebelas wanita yang diwawancarai semuanya mengalami zaman Pendudukan Jepang dan revolusi sebagai remaja atau wanita baru menikah yang memulai kehidupan berkeluarga. Mayoritas tinggal di Karesidenan Pekalongan, pesisir utara Jawa, tempat penelitian awal untuk meraih gelar doktor saya. Beberapa informan adalah wanita yang sudah saya kenal sejak awal 1970-an, meskipun saya sekarang menyadari bahwa ketika itu terlalu asyik bercakap dengan suami mereka. Itu bukanlah kesengajaan untuk mengesampingkan, melainkan semata-mata ditentukan oleh jenis sejarah yang ketika itu hendak saya tulis. Kesadaran yang muncul belakangan semakin diperkuat ketika saya sedang berada dalam perjalanan penelitian lapangan terakhir tatkala seorang wanita (suaminya pernah saya wawancarai beberapa kali sejak 1970-an) bertanya menjelang akhir wawancara, "mengapa anda tidak menanyakan demikian kepada saya sejak dulu?"

Pendudukan Jepang: "Sanggul Ikut Emansipasi"

Pendudukan Jepang tentu mengubah peranan wanita di Indonesia. Dalam rencana Jepang memobilisasi sumber daya manusia bagi kepentingan perang mereka, wanita memainkan peranan menentukan. Walaupun demikian wanita tidak terkooptasi dalam organisasi-organisasi massa seperti Putera, Jawa Hokokai, Seinendan, dan Keibodan dalam jumlah yang sama dengan pria. Fujinkai, yang kerap kali disebut sebagai organisasi wanita, sebenarnya merupakan sebuah organisasi istri para pegawai, setidaknya ini menurut kesan beberapa informan.⁷ Tetapi *Fujinkai* mendesak istri-istri pegawai, seperti dicatat Dobbin, untuk terjun berhubungan dengan wanita kebanyakan sambil menyelenggarakan kursus-

6. Organisasi wanita utama masa revolusi menurut Dobbin adalah Perwani, Pewari dan Kowani (*loc. cit.*, hal. 61). Organisasi wanita dalam sejarah resmi yang membahas peranan wanita dalam revolusi adalah Laskar Wanita Indonesia (Laswi), Laskar Putri Indonesia Solo, Barisan Puteri Indonesia, Barisan Putri Garut, Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) dan Wanita Pembantu Perjuangan (WAPP). Lihat Dra. Irma H.N. Hadi Soewito, *Labirnya Kelasykaran Wanita dan Wirawati Catur Panca* (Jakarta: Yayasan Wirawati Catur Panca, 1992), hal. 5, 19-78. Organisasi-organisasi lain adalah Barisan Srikandi, Laskar Buruh Wanita (LBW), Rukun Puteri Indonesia (Rupindo), Perkumpulan Puteri Indonesia (PPI), dan Mobilisasi Pelajar (Mopal).

7. Raminem, yang berusia 20 tahun saat Pendudukan Jepang, mengatakan Fujinkai adalah "sebuah organisasi istri para pegawai. Mereka tidak berbuat banyak untuk orang miskin. Mereka menyertai romusha ke stasiun", Wawancara di Borobudur, 7 Juli 1993.

kursus membaca dan dapur bersama. *Fujinkai* di Karesidenan Pekalongan sangat dikenal oleh penduduk setempat karena selalu mengerjakan dengan tanpa pamrih apa yang harus dikerjakan sambil menyelenggarakan demonstrasi memasak siput bersama resep seperti "Bubur Perjuangan" dan "Roti Asia".⁸

Bila *Fujinkai* adalah organisasi untuk wanita dewasa yang telah menikah, wanita muda yang belum menikah di Kabupaten Kendal bergabung dengan korps pemuda wanita *Josbi Senenbu* (wanita-wanita muda dinas penerangan). Mereka mengenakan seragam sederhana buatan sendiri dari kain tenun kasar. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu dengan latihan baris-berbaris. Bila seorang tamu penting Jepang datang berkunjung, *Josbi Senenbu* segera berbaris rapih sepanjang jalan dengan memberi salam hormat sambil membungkukkan badan (*seikere*). Anggota-anggota *Josbi Senendan* jelas bertugas membantu perekonomian dan juga mengadakan upacara-upacara penyambutan. "Kita harus menanam tanaman *jarak* dan mencari *alas*, daun yang dapat dimakan, yang kemudian di-

ambil oleh Jepang. Kita juga harus membuat kaus kaki panjang tidak bertumit terbuat dari *lawe* yang bisa dipakai prajurit Jepang untuk menyimpan makanan di dalamnya."⁹

Sebagai penguasa, pihak berwenang Jepang juga mendidik wanita untuk memainkan peran strategis di bidang sosial dan kemasyarakatan di luar organisasi massa formal. Peranan tersebut diperlihatkan secara gamblang dalam *Djawa Baroe*, majalah propaganda resmi dwimingguan yang mempromosikan usaha perang Jepang. Sampul muka majalah ini sebagian besar menampilkan seputar kecantikan, seperti gambar wanita

Jawa (dan Jepang) berbusana tradisional yang dianggap cocok saat melakukan kegiatan di zaman perang. Majalah ini memasukkan pula sejumlah kursus pelatihan baru tempat wanita dapat mempelajari teknik baru dalam pertanian atau bagaimana tenaga kerja wanita Jepang membantu usaha perang di Jepang, contoh-contoh yang diharapkan bakal diikuti wanita Indonesia.

Jepang juga mendirikan *Sekolah Kepandaian Poetri* yang mengajarkan cara membuat sarung batik, ilmu rumah tangga, dan pelajaran memasak "soepaja kelak memoeaskan soeaminja."¹⁰ Aktivitas-aktivitas ini sangat menekankan peran tradisional wanita, sedangkan pengalaman hidup bersama dalam asrama, sesuatu yang sangat ditekankan pihak Jepang, merupakan hal baru yang terus terbawa ke dalam revolusi. Wanita mempunyai kesempatan baru memperoleh pendidikan di sekolah para guru (disebut *Sekolah Latihan Goeroe-goeroe Poetri*) dan dapat diterima di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta. Wanita juga menerima pelatihan khusus beladiri Jepang "untuk wanita,"¹¹ dan para pelajar harus belajar teknik pertanian

melalui latihan praktek, termasuk menanam sayur-mayur di kebun sekolah.¹² Jepang mencoba mengubah gaya berpakaian wanita dengan memperkenalkan sejenis kimono setelan pendek (*mompe*) mengganti sarung dan blus tradisional Jawa. Pakaian itu diperkenalkan demi alasan praktis, wanita dianggap dapat lebih gesit bergerak jika mengenakannya saat mengerjakan tugas pertahanan sipil. Celana *mompe* juga dijanjikan lebih ekonomis karena dapat dibuat dari pakaian bekas, seperti sarung

Jepang mencoba mengubah gaya berpakaian wanita dengan memperkenalkan sejenis kimono setelan pendek (*mompe*) mengganti sarung dan blus tradisional Jawa. Pakaian itu diperkenalkan demi alasan praktis

8. Lucas, "The Bamboo Spear..." hal. 83.

9. Wawancara dengan Ibu Tejorusmi, Semarang, 11 Juli 1993.

10. *Djawa Baroe*, 3, Februari 2603 (1943), hal. 9-10.

11. *Djawa Baroe*, 12, 15 Juni 2603 (1943), hal. 18-19.

12. *Djawa Baroe*, 15, 1 Agustus 2603 (1943), hal. 19.

lama yang telah sobek atau berlubang. Upaya Jepang mengubah gaya berpakaian tampak tidak berhasil, mungkin karena iklim di Indonesia yang lebih panas dan *mompe* tidak cocok dengan jenis kerja pertanian wanita di pedesaan.¹³

Banyak sejarawan yang membahas dampak gaya latihan militer Jepang terhadap para pemuda pria dalam pendidikan militer selama Pendudukan sebagai bagian dari kebijakan mobilisasi massa Jepang. Gambar atau sejumlah foto pelatihan korps pemuda (*Seinendan*) dan korps siaga (*Keibodan*) Jepang di *Djawa Baroe* menunjukkan mereka semua adalah organisasi pria. Bagaimanapun juga latihan olah fisik yang selalu ditekankan Jepang terhadap penduduk berarti sejumlah wanita yang ikut dalam kursus "pelatihan kepemimpinan" harus belajar pula secara fisik untuk menjadi pemimpin masyarakat.¹⁴

Pada awal 1944 penguasa Jepang membangun sebuah organisasi khusus yang melatih wanita di Jatinegara, Jakarta. Organisasi yang disebut Barisan Srikandi ini kembali menekankan "latihan berasrama," belajar mengatur tata usaha sendiri, hidup sederhana seperti prajurit dan belajar "tata krama adat kewanitaan." Sebagai wanita baik-baik (terutama istri pejabat pemerintah berbangsa Indonesia) dianjurkan belajar Bahasa Jepang di seluruh pusat kota besar dan harus belajar memimpin kelompok-kelompok wanita di lingkungan Rukun Tetangga yang memang dibentuk di seluruh Indonesia untuk tujuan-tujuan pembagian bahan pokok dan beras, juga untuk pengawasan dan kontrol sosial, selain penanam gagasan Kemakmuran Seluruh Asia Timur Raya.¹⁵

Bagi sejumlah wanita, perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka selama

periode tersebut disimbolisasikan dengan metafora "*sanggul ikut emansipasi*." Selama periode akhir kolonial Belanda sebelum Perang Dunia II sebenarnya hanya ada dua jenis potongan rambut wanita Jawa yakni, *konde* (disebut juga *sanggul*) yang dikenakan bersama-sama pakaian tradisional, dan *jalinan* (tunggal atau ganda) yang dikenakan secara bebas. Jepang memperkenalkan gaya rambut baru yang disebut *Cioda*, yang dipakai bila baris-berbaris, sehingga ada wanita merasa "*sanggul ikut emansipasi*."¹⁶

Ada pula beberapa jenis potongan rambut yang sebelumnya tidak pernah dipakai yang memberi lebih banyak pilihan bagi wanita untuk mengatur rambut mereka. Selain gaya *siput* (suatu jalinan tunggal sebagai *sanggul*) yang biasa dipakai, wanita juga menggunakan *ekor kuda* peninggalan zaman Belanda. *Anggur 8* merupakan gaya potongan rambut yang paling sulit diatur ibarat "anda harus memasukkan rambut dalam alat pengeriting dan tidur di atas perut."

Wanita Korban Perkosaan

Sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah yang diduduki Jepang selama PD II, baik wanita Eropa (Belanda dan Indo) maupun Indonesia dipaksa untuk menyediakan jasa seksual bagi militer Jepang selama pendudukan. Wanita ini dalam Bahasa Jepang disebut *jugun iansu*, "wanita-wanita penghibur yang mengikuti angkatan bersenjata Jepang." Walaupun jumlah "wanita penghibur" ini tidak pernah diketahui secara pasti, di berbagai wilayah yang dahulu pernah diduduki Jepang selama PD II, seperti Korea Selatan dan Taiwan, kini para wanita tersebut telah membentuk semacam kelompok solidaritas dan "membuat publik" perlakuan maupun peranan mereka sebagai wanita penghibur, meminta kompensasi dan permintaan maaf Pemerintah Jepang melalui perwakilan mereka.

Di Indonesia, budaya malu untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman "buruk" masa silam mencegah banyak wanita Jawa untuk tampil mengisahkan pengalaman mereka. Meskipun beberapa di antara mereka

13. *Djawa Baroe*, 11, 1 Juni 2604 (1944), hal. 6, 14. Sebenarnya celana *mompe* dianggap memudahkan wanita yang bekerja di sawah, tetapi gambar wanita di pegunungan terpencil wilayah Belik, sebelah selatan Pematang, memperlihatkan petani wanita terlihat janggal saat mengenakan celana itu.

14. *Djawa Baroe*, 11, 1 Juni 2604 (1944).

15. *Djawa Baroe*, 8, 15 Januari 2604 (1944), hal. 8. Sangat mengherankan, Fujinkai atau aktivitas-aktivitas mereka tidak dipublikasikan atau diangkat dalam *Djawa Baroe*.

16. Wawancara dengan Ny. Suremi (nama samaran), Semarang, 12 Juli 1993.

mulai mendaftarkan diri ke YLBHI dan lembaga bantuan hukum swasta lainnya, tidak begitu jelas seberapa jauh upaya ini dapat membantu mereka. Pada akhir April 1993, tujuh belas wanita bekas *ianfu* berjumpa dengan sebuah tim yang terdiri dari lima penasehat hukum Jepang yang berada di Indonesia dalam rangka mengumpulkan data tentang isu *ianfu* yang dipersiapkan untuk sebuah konferensi di Jepang pada akhir 1993.¹⁷ Setelah pertemuan itu, T. Mulya Lubis, seorang pembela Hak Asasi Manusia terkemuka dari Jakarta, mendesak bekas *jugun ianfu* dan *romusha* untuk melaporkan diri ke lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia. Seorang wanita profesor psikologi juga mendesak anggota-anggota DPR yang wanita untuk menyampaikan persoalan tersebut. Seorang anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga anggota salah satu komisi di dalam DPR yang membidangi masalah-masalah Wanita, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, menyampaikan kepada khalayak bahwa yang lebih penting adalah Jepang meminta maaf daripada menawarkan "kompensasi material." Memberikan uang kepada wanita-wanita itu malah akan merendahkan harga diri mereka, yang tentunya tidak bisa diukur secara finansial.¹⁸

Persoalan ini juga mencuat dalam Konferensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina pada Juni 1993. Pemerintah Indonesia tampaknya mustahil mengambilalih persoalan itu secara resmi bila berhadapan dengan Jepang. Sejauh ini Jepang masih menjadi lembaga atau negara donor terbesar Indonesia. Bantuan dana dari Jepang sangat penting bagi kelangsungan program-program pembangunan Indonesia. Di samping itu Jepang dapat dijadikan mediator dengan berbagai pihak dalam masalah pembayaran utang luar negeri. Sebagai Ketua CGI, Jepang adalah negara paling berpengaruh dalam konsorsium negara-negara pemberi dana. Belakangan, kompensasi bagi tenaga kerja paksa atau *romusha* mencuat pula menjadi isu dengan begitu banyaknya yang berdatangan dan mendaftarkan diri ke sejumlah lembaga bantuan hu-

kum, walaupun pendaftaran sudah ditutup. Pengumuman ini tidak mengecilkan hati sekelompok 20 wanita, semuanya bekas *jugun ianfu*, yang pada Agustus 1993 tampil secara terbuka sebagai kelompok ke sebuah lembaga bantuan hukum di Yogyakarta. Saat itu, lembaga bantuan hukum bersangkutan sudah mempunyai 55 wanita yang terdaftar sebagai *ianfu*. Jumlah ini lambat-laun semakin meningkat.¹⁹

Persepsi dan Peran Wanita Selama Revolusi

Peran wanita selama Revolusi berbeda dengan peran dominan para pemuda pria (aktivis pemuda). Para wanita yang pernah saya wawancarai mengalami pelbagai macam penderitaan selama revolusi selain karena peranan *gender* mereka juga karena masalah sosial kehidupan sehari-hari saat itu.

Sebagian besar informan wanita saya adalah mereka yang telah menikah sebelum atau ketika menjelang pendudukan Jepang. Mereka terlihat mengurus anak-anak kecil ketika revolusi berlangsung. Kerap kali berpisah dengan orang tua, tempat menggantungkan dukungan secara turun-temurun para pasangan muda Jawa yang baru menikah, membuat mereka tidak dapat pergi keluar dan menjadi pejuang gerilya sekalipun mereka ingin melakukan demikian.

Banyak wanita yang tinggal di Karesidenan Pekalongan melakukan hal seperti itu dengan meninggalkan wilayah pendudukan Belanda sesudah serbuan militer pertama pada Juli 1947. Mereka berjalan kaki sambil membawa sedikit harta benda melintasi pegunungan menuju wilayah yang dikuasai Republik di sebelah selatan Wonosobo. Perjalanan yang disebut mengungsi ini dalam pengalaman masyarakat Jawa zaman itu disebut "*zaman pengungsian*." Mereka mengungsi karena suami mereka yang bekerja bagi Republik jika tidak meninggalkan wilayah yang dikuasai Belanda akan menerima resiko dimasukkan dalam tahanan. Untuk para wanita, pengalaman mengungsi memperluas berbagai persoalan baru yang

17. *Suara Merdeka*, 23 April 1993.

18. *Ibid.*

19. *Jawa Pos*, 13 Agustus 1993.

kelak berhasil diatasi, seperti berjalan kaki menuntun anak-anak dalam perjalanan melintasi gunung, menghindari patroli Belanda dan gerombolan perampok.

Menjelang akhir pendudukan, simpanan uang keluarga seringkali semakin menipis. Bila simpanan uang habis, wanita dapat menjual harta-benda yang tersisa untuk membeli makanan bagi keluarga mereka. Suami mereka, bila masih bekerja untuk pemerintah Republik yang baru, tidak pernah menerima gaji atau upah mereka terlalu kecil sehingga tidak banyak membantu. Wanita pun kadang-kadang kembali ke kegiatan tradisional dengan membuat dan menjual makanan ringan di rumah mereka untuk mencukupi kebutuhan (keluarga). Sisa makanan yang tak terjual dimakan oleh wanita dan keluarganya.

Sejumlah wanita merasa menjadi bagian dari proses revolusi karena apa yang dikerjakan suami mereka, lainnya karena mereka bebas dari ikatan keluarga, dan dapat secara langsung bergabung dalam perlawanan revolusioner. Seorang wanita yang tidak mempunyai tanggung jawab keluarga berangkat dan bahu-membahu bersama pria sebagai gerilyawan di wilayah Wonosobo. Meskipun tidak lazim, dia bertindak selaku kurir dan menyandang senjata. Apakah mereka "aktivis" atau bukan dalam pengertian ikut pemuda atau (jarang sekali) ikut gerilya, apakah mereka merasa sebagai bagian dari revolusi atau bukan, semua wanita Indonesia yang terjerumus dalam situasi historis revolusi adalah saksi mata tatkala prajurit Belanda menyiksa atau menembak penduduk sipil Indonesia dan menyaksikan pesawat terbang membomb wilayah pedesaan yang dikuasai Republik. Begitu pula dengan kehebatan mereka melahirkan anak-anak, dan mencoba menjaga keluarga agar tetap makan dan sehat dalam perjalanan, serta mengatasi tragedi keluarga yang disebut kematian bayi atau anak-anak kecil saat langkanya sumber daya medis yang tersedia dan tingginya angka kematian anak balita.

Bagi sejumlah wanita bersuami, barangkali mayoritas, perasaan menjadi bagian dari revolusi atau "menjadi Republikan" pertama-tama datang dari komitmen suami mereka. Ibu Umi Warsitohardjo, suaminya pernah ditahan lantaran aktivitas Republikannya di

Tegal pada Oktober 1947, merasa dia adalah seorang Republikan karena komitmen Ali Warsitohardjo, suaminya.²⁰ Ali Warsitohardjo, semasa menjadi mahasiswa pada awal perang di Sekolah Hukum Jakarta, telah berjumpa dengan Soepeno, tokoh terkemuka Partai Sosialis dan sahabat karib Perdana Menteri Sjahrir. Sampai dengan Aksi Militer I, Soepeno biasa menginap di rumah Umi dan suaminya di Tegal, sebuah rumah besar tua peninggalan zaman Belanda yang nyaris tanpa perabotan dan hanya ada dua tempat tidur kecil, "sehingga Pak Ali tidur di sofa, Soepeno tidur di dipan salah satu ruang, sementara saya tidur di dipan ruang lainnya." Hubungan Ali Warsitohardjo dengan Soepeno dan Partai Sosialis serta posisinya sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Tegal dari 1945—1947 mengakibatkan ia ditangkap dan ditahan tanpa diadili sampai Juni 1947.

Selama suaminya ditahan di Tegal, anak pertama mereka (dan satu-satunya) yang berusia lima tahun, Bambang Wijoyo, mengidap penyakit radang selaput otak dan meninggal secara mendadak di Rumah Sakit Kardinah. Suami Umi diperbolehkan melayat semalam oleh Kapten Kruis, sipir penjara. Tetapi Umi tidak diperbolehkan berbicara dengan suaminya yang harus duduk di serambi rumah:

Informan (I): Jadi [suami saya] berangkat membawa anak saya ke makan, saya diam di rumah.

Pewawancara (P): Ibu enggak ikut?

I: Kurang tabu saya, seperti ngimpi begitu anak saya meninggal terus rasanya bingung saya bagaimana. Sampai dia [suami] kembali ke penjara, saya tidak lama kemudian tinggalkan [rumah] itu. Karena saya dengar suaranya begitu, "Mama, mama, mama", kalau memanggil. Saya tinggalkan rumah itu, saya mondok di tempat itu, apa namanya, sepupu dia [suami]. Dia jadi guru, suami istri menjadi guru...bekerja pada Belanda di SMP..Mereka itu bekerja karena mereka berprinsip kalau tidak menjadi guru, anak mereka akan terlantar...Dari mereka kadang-kadang saya mendapat uang...Itu

20. Untuk biografinya lihat karya saya, "Democracy in Indonesia: It's Failure and Its Future. Conversations with a Group of ex-activist from the Revolution in Pekalongan Residency on Java's North-coast," Makalah yang disampaikan pada konferensi tentang demokrasi di Indonesia, Universitas Monash, Desember 1992, catatan kaki.

mereka dianggap menyeberang ke pihak Belanda/ atau tidak kalau begitu ya? Saya merasa apa, Republikan, saya merasa ya.

P. Merasa Republikan ya?

I. Karena suami saya dipenjara.²¹

Berkat usaha istrinya membujuk pemerintah Belanda di Tegal, Ali Warsitohardjo kemudian dipindah ke Rumah Tahanan Cipinang di Jakarta pada Juli 1949. Umi harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan membeli makanan untuk dikirim ke penjara. Dia memperoleh pekerjaan sebagai juru ketik dengan gaji f 250 sebulan di *dealer* Chevrolet, terletak di seberang Stasiun Kereta Api Gambir. Gaji yang diperolehnya "cukup untuk hidup dan mengirimkan makanan ke penjara." Namun Umi tidak terlalu suka bekerja di tempat ini karena banyak pegawai Belanda dan Cina yang menjadikannya tidak enak. Dia meninggalkan pekerjaan itu dan kemudian bekerja untuk *Vereeniging van Huisvrouwen* (Perkumpulan Ibu-ibu Rumah tangga) yang dirasakan lebih baik dan senang dapat berkumpul dengan wanita kebanyakan.²² Seperti banyak wanita terdidik segenerasi yang mulai berumah tangga kembali, berarti berhenti bekerja, Umi melakukan hal serupa ketika suaminya dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan (Konperensi Meja Bundar) dan bekerja kembali sebagai pegawai pemerintah.

Pengalaman Mengungsi

Salah satu pengalaman umum di berbagai wilayah Jawa pada masa revolusi fisik adalah meninggalkan rumah secara mendadak serta membawa anak-anak berjalan kaki meninggalkan wilayah pendudukan Belanda sesudah Aksi Militer I. Ini disebut, dan sekarang dipahami, mengungsi atau *pengungsan* dalam bahasa Jawa. Perjanjian Linggarjati pada November 1946 mengakui kekuasaan *de-facto* Republik atas Jawa, Bali dan Sumatera. Namun saling curiga dan permusuhan terus berlanjut, terutama setelah pihak Republik memerlukan waktu berbulan-bulan untuk

meratifikasi perjanjian ini. Belanda melancarkan serangan militer, yang secara eufemisme disebut "Aksi Polisionil," terhadap Republik pada 21 Juli 1947 untuk "memulihkan kembali hukum dan tertib sosial terhadap anarki Jawa." Kota-kota di sejumlah kabupaten pesisir utara Jawa dikuasai Belanda. Pemerintahan Republik di kota-kota ini dipindahkan ke Wonosobo di wilayah Banyumas.

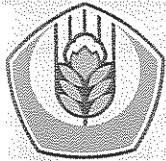
Dari dua pusat pemerintahan di Tegal dan Pekalongan, sejumlah keluarga harus berjalan ke selatan dan mencari arah melintasi pegunungan menuju Wonosobo, salah satu wilayah yang masih dikuasai Republik. Ibu Mustapha, yang menikah sebelum Pendudukan Jepang dan telah lama bermukim di Tegal, kehilangan anak kedua dan ketiganya saat zaman Pendudukan Jepang. Suaminya, komandan wilayah TNI Masyarakat yang mempunyai peran penting mengatur berbagai badan perjuangan di wilayah Pekalongan dan Tegal, berangkat ke selatan ketika Belanda memasuki Tegal. Ibu Mustapha tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Tegal. Dia juga pindah ke selatan Tegal dan melahirkan anak keempat dengan bantuan bidan tradisional setempat. Bersama bayi berusia empat bulan dia berjalan melintasi Gunung Slamet, mengenakan kain sarung dan menggendong bayinya, untuk akhirnya bertemu dengan suaminya di Wonosobo.

Ibu Wadyono, istri komandan militer Republik setempat, meninggalkan rumahnya di Pekalongan karena alasan serupa:

Saya bawa ponakan, ngungsi, ngungsi itu pergi dari Pekalongan, bawa keponakan dua ke Batang dulu. Terus itu masih ada Belanda itu. Terus saya takut, saya ndelik [bersembunyi] di bawah kolong tempat tidur, Belandanya masuk rumah, tapi yang punya rumah masih saudaranya anu, ayahnya Pak Wadyono. Begitu orang Katolik, yang punya rumah orang Katolik, keluarga Katolik, jadi [Belanda] ndak begitu ganas, baik [mereka]. Terus ngungsi ke Talun apa ya pertama...masih di Karesidenan Pekalongan ini, dari Batang terus ke Talun. Hari itu saya sama ponakan perempuan satu, pembantu satu, di jalan itu terus ada perampok, perampok kecil-kecilan, saya ndak bawa apa-apa, dirampok, ponakan saya sampai takut...sampai kencing-kencing be.. be.. be... [terawaj]. Tapi saya ndak papa...di tengah jalan ke Talun saya dengar ada tank, ada tank. Saya ndelik, ngumpet di...masuk kebun. Terus ndelik di grumbulan [kerimbunan] itu lho. Terus sampai Talun

21. Wawancara dengan Ibu Umi, Jakarta, 17 Juli 1993.

22. *Ibid.*



INDUK-KUD

S U P L E M E N

INDUK-KUD

Sinergi Kekuatan Jaringan Koperasi

Koperasi seringkali masih disorot sebagai pelaku ekonomi yang penuh dengan permasalahan. Padahal bentuk badan usaha yang merupakan wadah kepemilikan banyak orang ini, justru diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Apakah koperasi memang sulit berkembang sebagai entitas bisnis yang harus menjejalkan anggotanya? Akan tetapi, kalau sebuah induk koperasi memiliki aset Rp 1,56 triliun, bukankah itu menunjukkan kinerja usaha yang tak beda dengan sebuah "perusahaan raksasa"? Itulah Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD) yang kiprahnya menyentuh lebih dari 13 juta orang anggota pada jajaran primernya (KUD). Kemajuan Induk KUD patut disimak di tengah peringatan Hari Koperasi, 12 Juli 1996.

"Induk KUD ingin menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru serta meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalisme pengusaha-pengusaha kecil anggota KUD". Tekad itu diutarakan oleh H.M. Rapi'i, Ketua Umum Induk KUD untuk menyambut penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XVI Induk KUD pada Juli 1996. Ada sebuah kesadaran kuat di balik tekad itu, bahwa koperasi memang harus digerakkan dengan semangat kewirausahaan dan sikap kerja profesional. Dengan semangat itulah —sebagai salah satu modal dalam pengelolaannya— Induk KUD dapat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pamor Keberhasilan Koperasi

Menteri Koperasi dan PPK, Soebianto Tjakraherdaja, dalam suatu kesempatan mengungkapkan, "Keberhasilan yang ditunjukkan oleh koperasi sekunder, seperti Induk KUD misalnya, cukup menaikkan pamor perkoperasian Indonesia". Memang, baiknya pamor koperasi tentu erat kaitannya dengan citranya sebagai badan usaha yang mampu berlaga dalam percaturan ekonomi dan bisnis. Hal ini setidaknya dirasakan oleh Jeff Mustopha Atmaja, Direktur Utama Induk KUD. "Karena citra Induk KUD yang makin baik, maka usaha kerja sama dan tawaran dari luar pun muncul semakin banyak", ujar Jeff Mustopha. Adalah di balik citra itu, kinerja usaha yang terus

meningkat dan berbagai kegiatan yang sukses — dengan pengelolaan profesional— memang nyata telah ditunjukkan oleh koperasi sekunder yang kini berusia 17 tahun itu.

Selintas melihat ke belakang, Induk KUD lahir karena tuntutan kebutuhan dari KUD-KUD —koperasi primer di sektor pertanian dan wilayah pedesaan— yang tumbuh di berbagai pelosok Nusantara, dan setelah Pusat KUD terbentuk di berbagai propinsi, sejak awal 1970-an. Pada tingkat nasional, Induk KUD diharapkan berperan sebagai koordinator sekaligus pembina. Maka, fungsi utama yang dijalankan Induk KUD selalu diarahkan pada bidang-bidang usaha yang mengikutsertakan anggota dan jajaran di bawahnya, yakni Pusat KUD dan KUD. Usaha dan kegiatan Induk KUD pada akhirnya harus memberi manfaat maksimal bagi mereka. Dalam perkembangannya, koperasi sekunder ini terus mengupayakan KUD-KUD menjadi koperasi yang benar-benar mandiri. "Sasaran akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan jutaan anggota yang tersebar di 9.200 KUD", tutur Sugeng Hanjoyo, Sekretaris Perusahaan Induk KUD.

Memperkuat Primer

Basis usaha Induk KUD adalah sektor pertanian, lahan usaha yang penuh tantangan tetapi juga peluang. Dalam bahasa bisnis yang dijiwai semangat koperasi, Jeff Mustopha tak kurang menegaskan, "Induk KUD



harus mengambil peluang usaha yang ada, lalu melibatkan dan memberikannya kepada Pusat KUD dan KUD". Dalam hal inilah, usaha pokok yang diarungi Induk KUD meliputi pemasaran hasil produksi anggota dalam kancah perdagangan lokal, nasional dan internasional. Intinya, koperasi ini menjadi koordinator dalam tata niaga dan aktivitas perdagangan komoditi pertanian. Di sisi lain, Induk KUD juga mengusahakan pemasokan dan pengadaan sumber komoditi dan alat produksi pertanian bagi anggota. Di

sektor hulu, dalam rangkaian kegiatan usaha anggotanya, Induk KUD mendirikan pusat produksi dan pengolahan komoditi pertanian.

Masalah permodalan juga tak luput dari perhatian induk koperasi yang berkantor di Jl. S. Parman, Jakarta Barat, ini. "Sejauh primer-primer membutuhkan, kami akan menunjang dan memberi bantuan modal. Jadi koperasi sekunder berfungsi memperkuat primer", Sugeng Hanjoyo menambahkan. Selain itu, hal sangat penting agar semua kegiatan pada jajaran

Mengembangkan Unit Usaha, Membangun Usaha Patungan

Menjawab Tantangan Liberalisasi Perdagangan

Nama Induk KUD ternyata melekat pada sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai jenis usaha. Ada perusahaan agribisnis yang mengusahakan kelapa sawit. Ada pula yang bergerak dalam penggemukan sapi. Juga perusahaan muji grosir, bahkan di bidang perbankan. Bagaimana hubungan Induk KUD dengan perusahaan-perusahaan itu? Kalau dikatakan Induk KUD menjadi semacam *holding company* dari beberapa perusahaan, mungkin belum semesta begitu. Tapi, paling tidak Induk KUD memiliki saham di berbagai perusahaan berbentuk PT itu. Sebagian besar mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan anggota.

Beberapa dari perusahaan itu, oleh Induk KUD memang dimaksudkan untuk mengembangkan unit usahanya. Di sini Induk KUD bekerja sama dengan swasta membentuk anak perusahaan. "Pembentukan anak perusahaan ditekankan pada keterkaitannya dengan usaha dan kegiatan anggota", Sugeng Hanjoyo mengingatkan. Bisa disimak, misalnya, **PT Inkud Agritama** yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat. Dalam perusahaan ini Induk KUD memiliki saham 50%, Pusat KUD Sumatera Barat 5% dan swasta 45%. Investasi proyek kelapa sawit di sini mencapai sekitar Rp 148 milyar. Tampaknya Induk KUD cukup jeli melihat prospek pasar *Crude Palm Oil (CPO)* dalam 10 tahun mendatang. Apa lagi, "adanya agro industri kelapa sawit akan sangat menguntungkan anggota Induk KUD dan KUD", ujar Jeff Mustopha. Memang, usaha kelapa sawit ini menggunakan pola bapak angkat, dengan KUD-KUD menjadi plasma.

Masih di bidang kelapa sawit, Induk KUD kini juga memiliki saham masing-masing 80% di **PT Citalaras Cipta Indonesia** dan **PT Suburbumi Primatama**. Usaha perkebunan, khususnya kelapa sawit, tampaknya akan menjadi usaha inti (*core business*) Induk KUD di masa datang. Unit usaha yang juga strategis bagi Induk KUD adalah di bidang peternakan. Maka, melalui **PT Inkud Satwa Nusantara** (saham Induk KUD 77%), koperasi sekunder ini mengusahakan penggemukan sapi dan pakan temak.

Ada lagi usaha yang ditekuni Induk KUD, yakni pergroseran. Bekerja sama dengan swasta, Induk KUD berpatungan dalam usaha perkulakan **PT Goro Yudhistira Utama**, dengan saham 25%. Dalam rangkaian pengembangan usaha ini, Induk KUD mendirikan depo-depo di berbagai propinsi. Untuk depo di Yogyakarta, misalnya, Induk KUD membentuk **PT Inkud Niaga Mataram**, dengan 60% kepemilikan saham. Melalui depo-depo inilah Induk KUD dapat melayani pemasokan barang kebutuhan Waserca milik KUD-KUD, memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitarnya. "Bayangkan, di sini Induk KUD memiliki potensi pasar yang begitu besar, yaitu anggota KUD dan keluarganya", Jeff Mustopha optimis.

Banyak lagi, yang saat ini sedikitnya berjumlah 13, perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh Induk KUD. Termasuk di bidang perbankan, seperti **Bank Bukopin** serta **Bank Dagang** dan Industri. Namun demikian, pengembangan usaha Induk KUD melalui sejumlah PT, tak urung menimbulkan pertanyaan. Ka-



di bawah Induk KUD berjalan sukses adalah kemampuan SDM yang mengelolanya. Karena itulah, Induk KUD juga melakukan jasa layanan untuk pendidikan anggota, guna peningkatan kualitas SDM. Jasa konsultasi juga diberikan kepada anggota, misalnya untuk mempersiapkan proyek agro industri serta pengembangan organisasi dan manajemen.

Dengan fungsi dan kegiatan pokok itulah Induk KUD merebak dan berkembang ke berbagai bidang usaha dan jenis komoditi pertanian. Untuk komoditi

gaplek misalnya, Puskud dan KUD di bawah koordinasi Induk KUD telah melakukan ekspor ke negara-negara MEE dan non-MEE. Hal yang sama juga dikembangkan dalam tata niaga dan aktivitas perdagangan kopi, kakao, vanili dan hortikultura. Komoditi yang saat ini menjadi tulang punggung Induk KUD adalah cengkeh. Koperasi ini menjadi anggota BPPC, dengan peran utama mengelola dana penyertaan KUD dan simpanan wajib khusus petani, sehingga pada gilirannya seluruh kegiatan tata niaga cengkeh dikelola oleh jajaran

langan tertentu misalnya mengaitkan hal itu dengan prinsip yang dianut koperasi. Ada kekhawatiran, koperasi akan beranjak dari hakikat dan fungsi dasarnya, kalau usahanya dikembangkan melalui badan PT. Akan tetapi, Sularso, mantan Direktur Jenderal Koperasi Pedesaan, mencoba lebih realistis melihat soal itu. "Pada umumnya, koperasi sangat sulit berkembang, karena tidak cukup mempunyai akses modal, teknologi dan pasar", ungkapnya. Untuk itu, menurut Sularso, pembentukan unit-unit usaha berujud PT merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh.

Bagi Jeff Mustopha Atmaja, Dirut Induk KUD, "yang penting bukan pada bentuk PT itu, tapi pada tujuan dan manfaatnya". Ia mengartikan, bahwa keuntungan dari sejumlah perusahaan itu tetap jatuh pada anggota. Sementara kepemilikannya pun tetap pada koperasi. Usaha patungan Induk KUD dengan swasta, dalam pengertian yang sekarang populer, merupakan bagian dari kerja sama kemitraan. "Tujuannya, alih teknologi dan menghimpun modal", kata Sugeng Hanjoyo. Sekretaris Perusahaan Induk KUD itu juga menyebut keuntungan lain. Misalnya, transaksi antara perusahaan itu dengan anggota, atau perolehan bagian dari dividen.

Menurut Sularso, pengembangan unit usaha dalam bentuk PT merupakan instrumen yang tepat bagi koperasi sekunder. "Itu sejalan dengan tugas koperasi sekunder yang harus mengembangkan koperasi primer dan anggotanya", ujar tokoh yang lama berkecimpung dalam pembinaan koperasi itu. Ia melihat,

USAHA PATUNGAN INDUK KUD

(ribuan Rp)

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nilai Saham
Bank Bukopin	Perbankan	4.165.663
PT Abbatoir Suya Jaya	Pemotongan Hewan, Cold Storage	100.000
Bank Dagang & Industri	Perbankan	343.977
PT Induk Agrindo Perkasa	Pengolahan Juice Nenas	1.500.000
PT Inkud Satwa Nusantara	Penggemukan dan Pemasaran Sapi	2.765.000
PT Humpus Graha Nabati	Industri Kelapa Sawit	—
PT Goro Yudhistira Utama	Multi Grosir	1.000.000
PT Inkud Agritama	Agribisnis Kelapa Sawit	3.000.000
PT Tulas Saktijaya	Agribisnis Kelapa Sawit	921.579
PT Citalaras Cipta Indonesia	Agribisnis Kelapa Sawit	1.740.000
PT Suburbumi Primatama	Agribisnis Kelapa Sawit	860.000
PT Kias Inter Trade	Trading House	10.000
PT Inkud Niaga Mataram	Depo Goro/Multi Grosir	300.000
JUMLAH		16.706.219

subsidiary company — dengan pengertian *user owned oriented firm* secara konsisten— akan tampak jelas perannya. Misalnya saja, dalam pengelolaan penyaluran dana, usaha pemasaran dan distribusi, atau usaha produksi.

Jelas tersimpul, bahwa bagi Induk KUD, kerja sama atau usaha patungan itu dapat mengatasi kendala internal bagi pengembangan usahanya. Tentu saja dalam rangka usaha dan kegiatan anggotanya. Akan tetapi, di sisi lain ada hal yang sangat strategis. Dengan perusahaan-perusahaan itu sebagai tangannya, Induk KUD akan lebih kompatibel menghadapi dinamika ekonomi dan percaturan bisnis. Induk KUD sadar, bahwa di depan terhampar tantangan era liberalisasi perdagangan. Koperasi sekunder ini tak ingin tertinggal. Induk KUD sebagai bagian dari gerakan koperasi ingin mengambil peranan besar dalam perekonomian nasional, dan juga internasional.



koperasi unit desa (KUD, Pusat KUD dan Iduk KUD). Dalam perdagangan dan pendistribusian berbagai komoditi itu, pergudangan adalah faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, "Kami terus berupaya membangun gudang-gudang untuk cengkeh, gapek, cokelat dan komoditi lain di berbagai propinsi", tukas Jeff Mustopha, nakoda pengelola Induk KUD yang sebelumnya adalah manajer Pusat KUD Jawa Barat.

Koperasi, yang beranggotakan 27 Pusat KUD, satu Pusat Koperasi Serba Usaha dan satu Pusat

dan jajarannya, yakni Pusat KUD, KUD dan para petani. Jadilah mereka sebuah senergi yang melakukan pendalaman dan pengembangan usahanya di bidang produksi dan pemasaran komoditi pertanian. Dan bahkan melebarkan jaringan usahanya dengan melaksanakan kemitraan —melalui usaha kerja sama, usaha patungan, pendirian anak perusahaan— yang kesemuanya menjadi sebuah jaringan kekuatan bisnis. Dengan begitu, tak heran bila kinerja usaha Induk KUD sendiri berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 1990 volume usahanya hanya Rp

1,72 milyar, maka pada tahun 1995 volumenya telah mencapai Rp 933,21 milyar. Dengan lompatan raksasa, asetnya bergerak dari Rp 23,64 milyar pada 1990 menjadi Rp 1,56 trilyun pada 1995. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperolehnya pada tahun 1995 adalah Rp 7,39 milyar,

KINERJA KEUANGAN INDUK KUD

(jutaan RP)

ITEM	1990	1991	1992	1993	1994	1995
SHU	555	404	1.657	2.702	8.309	7.398
MODAL	8.102	125.320	386.816	499.859	696.398	986.813
HUTANG	15.544	20.306	382.500	330.245	369.557	572.187
ASET	23.646	145.626	769.316	830.104	1.065.955	1.561.786
VOLUME USAHA	1.724	1.887	186.428	445.114	609.998	933.213

Koperasi Pedagang Pasar, ini juga bergiat dalam perdagangan dan distribusi pupuk, beras, garam, gula pasir dan jeruk. Usaha yang juga digelutinya adalah pabrik pengolahan kayu, pabrik makanan temak, dan usaha pemotongan hewan yang bekerja sama dengan swasta. Bidang peternakan diharapkan akan menjadi unit usaha strategis atau *core business* bagi Induk KUD. Dalam usaha penggemukan sapi potong misalnya, Induk KUD telah memiliki unit usaha dalam bentuk anak perusahaan. Begitu juga dalam bidang perkebunan kelapa sawit, koperasi yang beranjak besar ini telah membentuk anak perusahaan atau usaha patungan dengan swasta. Yang agaknya perlu dicatat, sebagaimana diungkapkan Jeff Mustopha, dalam PIR Kelapa Sawit, kalau dulu swasta yang menjadi inti, maka sekarang Intinya adalah Induk KUD.

Berbagai prestasi membuktikan kepercayaan pihak luar kepada Induk KUD. Misalnya dari dunia perbankan. Induk KUD telah menandatangani MOU dengan 5 bank swasta (Bank Danamon, Bank Universal, Bank Duta, Bukopin, Bank Niaga) untuk pinjaman berjumlah Rp 1, 32 trilyun.

Lompatan Raksasa

Singkat kata, Induk KUD bergerak dari akarnya, bergotong royong dari, untuk dan bersama anggota

sementara lima tahun sebelumnya hanya Rp 555,0 juta (lihat Tabel).

"Kami memiliki *net-work*, yakni anggota petani, KUD dan Pusat KUD, yang begitu besar dalam jumlah dan jangkauan. Inilah kekuatan sinergi kami yang mungkin tidak dimiliki lembaga lain", kata Sugeng Hanjoyo tegas. Mengibaratkan kancah bisnis sebagai medan pertempuran, sinergi itu disebut Sugeng sebagai "kekuatan yang ditakuti lawan". Akan tetapi para pengelola Induk KUD menyadari, bahwa masih banyak kerja yang harus dilakukan. "Induk KUD harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas", tukas Jeff Mustopha. Dalam pandangan Soebiakto Tjakrawerdaja, Induk KUD sudah tidak bisa lagi mengandalkan sektor bisnis yang protektif. Ia mengingatkan akan datangnya tantangan liberalisasi perdagangan itu, yang mau tidak mau menuntut sikap kerja profesional. Maka, bagi pengurus dan direksi Induk KUD, upaya ke arah peningkatan pengelolaan yang makin profesional akan terus dilakukan. Intinya adalah pada pengembangan kualitas SDM, baik di lingkungan Induk KUD sendiri maupun di kalangan Pusat KUD dan KUD. Profesionalisme itulah justru yang telah menjadikan Induk KUD disegani.

(Maruto/Wawan Zulmawan)

sore, malem, terus nginep di tempatnya orang situ penduduk, bukan lurah, bawabnya itu lurah. Itu sampai ndak pakai sandal, sampai sakit rasanya kaki itu.²³

Untuk wanita lajang pengalaman *ngungsi* atau meninggalkan rumah dan menetap di desa memunculkan berbagai pengalaman baru. Ibu (Janda Pahlawan) Supeno (suaminya adalah Menteri Pemuda dan Pembangunan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin) yang dibesarkan di Banjarnegara, harus meninggalkan wilayah itu ketika Belanda datang. Dia kemudian bergabung dengan gerakan gerilyawan Republik.

Di dalam pengungsian itu saya membantu ini, saya membantu, pertama tugas saya di sana itu kalau ada serangan ya, Banjarnegara itu terkenal serangannya itu canonade. Pungung gunung itu kan kalau sudah dengar "dong dong" rakyat terus panik. Rakyat panik, terutama wanita-wanita. Ini saya menenteramkan mereka, membantu menenteramkan mereka. Jadi saya sudah dikursus oleh mereka. "Bu, kalau suaranya begini itu mereka masib sejaub ini", gitu lho. Jadi ada canon dong-dong suaranya dari mana kita harus dengarkan dulu. Saya mau mencoba ikut serta menenteramkan rakyat. Dan saya membantu ya semacam dapur umum gitu lah. Dari Banjarnegara kita naik lagi ke gunung... namanya desa Larangan... memang daerahnya miring ya, memang gunung. Jadi kalau pagi saya ikut dengan rakyat disitu mencari daun-daun apa yang bisa kita masak, bisa disayur atau bisa diapa, ubi, macam-macam. Kita cari, kita coba untuk mereka, tentara-tentara yang ada di lingkungan kita itu... divisi Pak Gatot Subroto.²⁴

Sampai sekarang, yang paling diingat Ibu Supeno bukanlah pidato para pemimpin atau peristiwa politik, melainkan apa yang dialaminya ketika pulang dari kantor "koperasi pengungsi."

Pulang itu di Banjarnegara diserang, diserang. Lha, saya itu saking takut, saya itu ndiosor (rebah) to ya pak ya, langsung tiduran di antara pobon-pobon ini, pobon pisang. Di pinggir jalan itu ada kebun pisang, saya terus sreg masuk ke situ tiduran di situ. Tapi ituunya pendek sekali binggga saya bisa melibat yang di pesawat itu mereka ketawa-ketawa begitu... sedangkan yang diserang itu tidak jaub dari tempat

saya ngglosor itu stasiun kereta api Banjarnegara, yang diserang itu sama pasar. Saya kalau ingat itu, ya yang saya ingat, ya anak saya. Pada waktu itu suami saya enggak ada di situ, wab kalau saya sampai kena itu anak saya gimana ayabnya enggak tahu...itu tu yang paling saya inget dalam perjalanan mengungsi.²⁵

Seperti disebutkan sebelumnya, mayoritas wanita yang telah menikah saat itu tidak dapat bergabung dengan gerakan revolusi kemerdekaan. Walaupun tinggal di wilayah yang dikuasai Belanda, tidaklah berarti mereka semua pro-Belanda. Suami Ibu Karmo menjadi bupati revolusioner Kendal, wilayah sebelah barat Semarang, pada 1945 dan memindahkan administrasi pemerintahannya ke Wonosobo awal 1946 ketika NICA (Netherlands Indies Civil Administration) mulai menguasai Semarang, ibukota provinsi, termasuk Kendal. Dia merasa menjadi beban bila mengikuti kepergian suaminya.

Karena kami ikut suami dan ada di dalam daerah NICA...saya merasa menjadi penonton dalam proses revolusi...karena tak dengar letusan peluru dan tak mengalami kesukaran mengungsi. Tapi jika, umpamanya saya ikut malah menjadi beban suami, ia tak bisa khusus mencurahkan perhatian pada perjuangan, ya toh. Itu yang meringankan bebanku, tak ikut merasakan lari mengungsi waktu musuh mengepung daerah kami...²⁶

Mata Uang

Jepang mengganti mata uang Belanda dengan uang Jepang di seluruh wilayah Indonesia sejak awal pendudukannya. Republik juga memperkenalkan mata uang ORI (*Oeang Republik Indonesia*) setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ketika Belanda kembali bersama Sekutu, mereka membawa mata uang sendiri yang oleh penduduk setempat disebut uang Federal atau uang NICA. Di tempat-tempat yang dekat dengan pemerintahan yang dibangun Belanda, seperti di Kendal, uang federal beredar sepanjang masa revolusi. Di Jakarta dan Surabaya, mata uang Belanda yang disebut uang NICA beredar bersama-sama dengan ORI. Para ibu rumah tangga dan pedagang membawa kedua mata uang itu ke pasar untuk

23. Wawancara dengan Ibu Wadyono, Semarang, 10 Juli 1993.

24. Wawancara dengan Ibu Supeno, Semarang, 10 Juli 1993.

25. *Ibid.*

26. Wawancara dengan Ibu Karmo, Semarang, 12 Juli 1993.

belanja sehari-hari, karena para pedagang di pasar bisa memilih. Belanda mengizinkan peredaran kedua mata uang itu, setidaknya di kota-kota kabupaten di Karesidenan Pekalongan. Di Jawa Tengah bagian selatan keadaan para wanita pedagang kelihatan lebih sulit, bukan karena Belanda melainkan tindakan-tindakan yang dilakukan militer Republik.

Orang tua Ibu Raminem, yang lahir di Sumatera, adalah buruh perkebunan di pulau itu. Saat memasuki zaman Depresi, Raminem yang ketika itu berusia 9 tahun beserta enam saudara prianya diajak oleh kedua orangtuanya untuk pulang kembali ke pedesaan di Borobudur. Semua saudaranya kemudian dimasukkan ke sekolah desa setempat. Raminem tidak disekolahkan karena dia seorang wanita. Dia malah bekerja sebagai pelayan di Hotel Borobudur dengan upah 9 gulden sebulan (harga beras waktu itu 30 sen). Hotel kecil 16 kamar ini milik orang Belanda yang diperuntukkan wisatawan bermalam di Borobudur. Ayah Raminem juga bekerja di hotel ini sebagai tukang kebun.²⁷ Raminem masih memiliki ingatan kuat saat mengenang masa-masa sulit zaman Pendudukan Jepang, seperti makan singkong kering setiap hari dan melihat pengemis sekarat yang tergeletak di jalan-jalan akibat kurang gizi. Adik lelakinya dikirim ke Sumatera sebagai *romusha*. Jepang juga membuka sebuah pabrik pemintal kecil tempat para gadis setempat bekerja. Banyak yang mengenakan sarung terbuat dari karung goni. Raminem menolak mengenakan jenis pakaian itu meskipun sarungnya telah penuh dengan tambal-sulam.

Selama revolusi, Raminem menyadap gula aren dan memungut telur untuk dijual ke pasar dekat kota Magelang yang diduduki Belanda:

I: Pagi pukul anem ya dari [Borobudur] sana sampai pukul delapan. Menyeberang sungai, habis enggak ada kendaraan, kalau bawa itu telur ayam. Telur ayam di jalanan kalau sama tentara Republik, ya

27. Mengenai kesan ibu Raminem saat bekerja untuk Belanda silakan lihat wawancaranya dalam "Kings and Coolies," dokumenter televisi selama 53 menit dalam format VHS Video, 1992. Bagian pertama dari tiga seri "Riding the Tiger," diproduksi dan disutradari Curtis Levy dan Christine Olsen, tersedia di Olsen Levy Production, 113 Birchgrove Road, Birchgrove, NSW, Australia.

enggak boleh. Itu kan mau dijual sama Belanda. Kan enggak boleh masuk di Magelang.

P: Kalau ketabuan tentara Republik, diapain oleh tentara?

I: Enggak boleh, diminta telurnya, enggak dibayar, enggak tabu, dimakan enggak, enggak tabu.

P: Ibu enggak merasa berdosa menjual telur pada Belanda?

I: Enggak, kok dosa. Orang jualan kok berdosa (sambil ketawa)

P: Kok, jual telur sama penjajah?

I: Ha, iya, habis cari makan kok. Orang cari makan itu sama Belanda, ya enggak papa to. Belandanya ya mau makan, orang kampung ya mau makan.²⁸

Raminem biasanya menukarkan mata uang Belanda yang dimilikinya di Magelang setiap hari sebelum kembali ke Borobudur. Uang ORI sebagai hasil penukaran itu digunakannya untuk membeli segala kebutuhan di Borobudur. Kedua mata uang itu, ORI dan Federal, dapat digunakan bersama di kota Magelang. Sebaliknya, jika militer Republik menemukan pedagang membawa uang Federal, konsekuensi yang diterima sangatlah serius:

Kalau jualan di Magelang itu, kalau belinya di sini [Borobudur] itu uang ORI. Nanti kalau laku di sana, itu di Magelang, pakai uang Federal ya. Ada uang tidak suka "Ah, nggak suka uang Federal, uang Belanda itu nggak laku," bilang gitu. Ada yang seneng, nanti kalau orangnya masuk Magelang...sebab Magelang itu banyak Belanda. Belanda itu, serdadu datang baru itu kan uangnya Belanda. [Kalau] pakai uang Federal semua, ya nggak laku ya to. Itu kan disimpan, jangan sampai libat tentara Republik. Kalau libat, ya dikasih mati. Nggak boleh, kalau di Magelang sana itu banyak uang Federal, tapi ya itu, kalau di sini, ya itu, harus disimpensipen, nanti lakunya masuk Magelang lagi.²⁹

Raminem tidak menyesal berdagang dengan Belanda karena bagaimanapun juga dia bisa dan harus hidup. Dia tidak meninggalkan rumahnya ketika Belanda menduduki kembali Borobudur, karena dia tidak tahu cara men-

28. Wawancara di Borobudur, 7 Juli 1993.

29. Raminem mengatakan bahwa kita harus menyembunyikan uang Federal di wilayah yang dikuasai Republik. "Kamu tidak boleh membiarkan tentara Republik melihat uang federal milikmu, atau kamu akan dibunuh," lihat wawancara dengan Ibu Raminem, Borobudur, 7 Juli 1993.

cukupi kebutuhannya sendiri kalau mengungsi. Dia tidak ingin menjadi beban rakyat desa tempatnya menetap apabila keluar dari wilayah pendudukan Belanda menuju wilayah berdekatan yang dikuasai Republik.

Sebagai seorang wanita, Raminem merasa dirinya terhambat bila bergabung dengan aktivis, sebagian besar karena alasan *gender*. Walaupun secara teoritis seorang wanita muda boleh mengikuti "bambu runcing" (diartikan sebagai aktivis pemuda revolusioner), gagasan aneh dan terdengar ganjil ini dianggap tidak pantas. Bagaimana bisa mencampur wanita dengan pria jika pertempuran sedang berkecamuk? Di samping itu, ujamya, semua pemuda di sekitar wilayah Borobudur dipimpin para haji, mengimplikasikan juga bahwa Islam mengesampingkan wanita dari jenis kegiatan tersebut lantaran alasan agama. Namun alasan utamanya adalah karena secara kultural wanita tidak mempunyai peran dalam perjuangan revolusioner.

I: Tau, orang perempuan kok pergi bawa bambu runcing, nggak ada [ketawa]. Semua laki-laki anak pemuda-pemuda. Perempuan ya bisa, tapi ya nggak pantas.

P: Orang perempuan baru dimana kalau begitu?

I: Di rumah! Ya, kerja di rumah, bambu runcing kan cuma di jalan, naik truk, nanti dimana, Parakan, Temanggung itu apa, ada apa, mungsuh apa-apa bambu runcing..³⁰

Ringkasan

Sejumlah kecil wanita yang diwawancarai untuk tulisan ini cukup merata variasi pengalamannya sehingga dapat dibuat beberapa pengamatan umum (oleh sejarawan pria). Pendudukan Jepang dan revolusi memutuskan masa lalu banyak wanita. Pendudukan Jepang sangat dahsyat mempengaruhi wanita karena peran *gender* tradisional mereka sebagai istri, ibu dan pengurus atau pencari nafkah, memperoleh pukulan paling berat lantaran kekurangan bahan pangan, barang-barang kebutuhan pokok, dan sandang serta ketidaknyamanan mengenakan sarung goni yang gatal atau pakaian karet yang berisik dan panas. Pengalaman terburuk semasa

pendudukan bagi wanita Indonesia adalah sebagai *ianfu* yang saat ini menjadi isu politik di Indonesia, meskipun dampak politiknya tidak sepenting di Korea Selatan dan Taiwan. Kegiatan-kegiatan lainnya, seperti tinggal di asrama dan membantu produksi pertanian zaman perang, serta pengajaran merupakan peran-peran baru wanita yang berlangsung di dalam perangkat ketat masyarakat tradisional Jawa (dan Jepang).

Selama revolusi, para wanita mempunyai lebih banyak kebebasan untuk memilih peranan baru apabila mereka menginginkannya, terutama bagi yang belum menikah. Sekalipun cocok dengan peranan lama, atau merasa "tidak pantas" karena alasan budaya untuk bergabung dengan kelompok gerilyawan aktivis (pria), lebih banyak wanita yang masih mencari nafkah baik untuk diri sendiri maupun untuk rumah tangga mereka. Ini berarti mereka harus hidup dalam situasi yang baru seperti berdagang atau berjualan di pasar dengan menggunakan mata uang Belanda atau Republik.

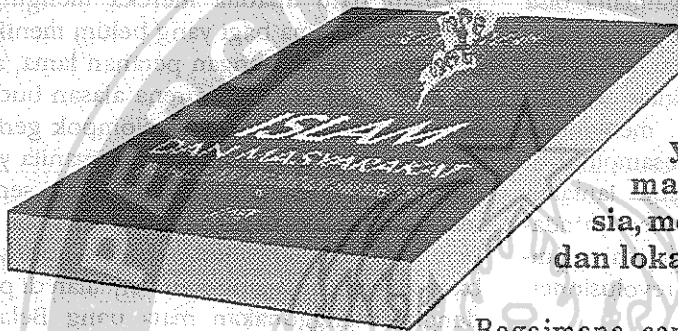
Bagi wanita yang terpaksa, atau memilih, meninggalkan rumah tangga di wilayah-wilayah yang diduduki militer Belanda, harus mengatasi segala jenis kesulitan hidup, termasuk menyandarkan diri pada keramahan penduduk desa, melahirkan dan merawat anak yang sakit serta menguburkan anak-anak dalam perjalanan yang jauh dari rumah atau orang tua.

Banyak wanita tidak melihat diri mereka sendiri sebagai bagian dari perjuangan revolusioner, karena alasan *gender* (seperti Raminem) atau karena dalam suasana revolusioner para wanita merasa tidak praktis tampil bersama dengan suami mereka, walaupun mereka belum mempunyai anak. Ini merupakan peranan wanita yang diatur oleh kebudayaan Jawa.

Situasi revolusioner 1945-1948 memberi sekelompok kecil wanita terdidik perkotaan peran baru dalam organisasi perjuangan (tidak dibahas dalam tulisan ini), atau dalam gerakan gerilyawan Republik sebagai kurir (melanjutkan peran yang dimainkan wanita dalam gerakan bawah tanah anti-Jepang semasa perang), dan kadangkala sebagai pejuang gerilya.●

30. *Ibid*

Menyorot Gejolak Sosial Keislaman Indonesia



Islam telah menanamkan seperangkat nilai yang menjadi etos masyarakat Indonesia, menerobos batas etnis dan lokal.

Bagaimana corak ketegangan Islam sebagai kultur dan masyarakat sebagai struktur? Pakar terkemuka, **Prof. Dr. Taufik Abdullah** menyorot soal Islam dan negara, tradisi politik dan kepemimpinan Islam, politik tradisional vs reformis; dinamika eksternal pesantren; Islam di Aceh, Minangkabau dan Palembang; dan lain-lain.

Kedudukan Islam telah turut membentuk Sejarah Indonesia. Bacalah buku ini, sebuah catatan sejarah, sekaligus apresiasi aktual ke depan tentang Islam dan masyarakat Indonesia.

**ISLAM DAN MASYARAKAT
Pantulan Sejarah Indonesia**

Taufik Abdullah

292 hal., Rp 11.000,-

Dapatkan di toko buku kota Anda. Pesanan langsung disertai ongkos kirim 10%
(minimum Rp 2.000,-) ke:

PT Pustaka LP3ES Indonesia
Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420
Telp. : 5663527, Fax. : 5683785